

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan secara etimologis berasal dari kata dasar “daya” atau “power” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari kemampuan tersebut pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya/kekuatan/kemampuan dan atau proses pemberian daya/kekuatan/kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Pengertian “proses” menunjuk pada serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan secara kronologis sistematis yang mencerminkan pertahapan upaya mengubah masyarakat yang kurang atau belum berdaya menuju keberdayaan. Proses akan merujuk pada suatu tindakan nyata yang dilakukan secara bertahap untuk mengubah kondisi masyarakat yang lemah, baik *knowledge*, attitude maupun *practice* menuju pada penguasaan pengetahuan, sikap perilaku, sadar dan kecakapan keterampilan yang baik.

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan

aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.¹

Priyono dan Pranarka menyatakan bahwa pemberdayaan mengandung dua arti. Pengertian pertama adalah *to give power or authority*, sedangkan pengertian kedua *to give ability to or enable*. Pemaknaan pengertian pertama meliputi memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepada pihak yang kurang/belum berdaya. Di sisi lain pemaknaan pengertian kedua adalah memberikan kemampuan atau keberdayaan serta memberikan peluang kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu.²

Berbeda dengan pendapat Pranarka, Sumodiningrat menyampaikan bahwa pemberdayaan sebenarnya merupakan istilah yang khas Indonesia daripada barat. Di barat istilah tersebut diterjemahkan sebagai *empowerment* dan istilah itu benar tetapi tidak tepat. Pemberdayaan yang dimaksud adalah memberi “daya” bukanlah “kekuasaan”. Empowerment dalam khasanah barat lebih bernuansa “pemberian kekuasaan” daripada “pemberdayaan” itu sendiri. Barangkali istilah yang tepat adalah “energize” atau katakan memberi energi. Pemberdayaan adalah memberi energi agar yang bersangkutan mampu untuk bergerak secara mandiri.³

Pada hakikatnya pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Logika ini didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa memiliki daya. Setiap masyarakat pasti memiliki daya, akan tetapi kadang-kadang mereka tidak menyadari, atau daya tersebut masih belum dapat diketahui secara eksplisit. Oleh karena itu daya harus digali dan kemudian dikembangkan. Jika

¹ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung : Refika Aditama, 2015), 59.

² Suryana, *Pemberdayaan Masyarakat* (Semarang : UNNES Pres, 2010), 16.

³ Ibid., 17.

asumsi ini yang berkembang, maka pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya, dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Di samping itu pemberdayaan hendaknya jangan menjebak masyarakat dalam perangkat ketergantungan (*charity*), sebaiknya pemberdayaan harus mengantarkan pada proses kemandirian.⁴

2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah membantu pengembangan dari masyarakat lemah, renta, miskin, marjinal dan kelompok wanita yang didiskriminasi atau dikesampingkan. Memberdayakan kelompok masyarakat tersebut secara sosial ekonomi sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan dalam pengembangan masyarakat.⁵

Menurut Sulistyani mengatakan tujuan pemberdayaan adalah sebagai berikut: “yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Lebih lanjut perlu ditelusuti apa yang sesungguhnya dimaknai sebagai suatu masyarakat yang mandiri. Kemandirian masyarakat adalah suatu kondisi yang dialami masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang

⁴ Ibid., 18.

⁵ Sulistyani, *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaaan Masyarakat* (Bandung : Gava Media, 2017), 79.

dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik dengan pengerahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut”.⁶

Pemberdayaan masyarakat hendaklah mengarah pada pembentukan kognitif masyarakat yang lebih baik. Kondisi kognitif pada hakikatnya merupakan kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seseorang atau masyarakat dalam rangka mencari solusi atau permasalahan yang dihadapi. Kondisi konatif merupakan suatu sikap perilaku masyarakat yang diarahkan pada perilaku sensitif terhadap nilai-nilai pembangunan dan pemberdayaan. Kondisi afektif adalah merupakan *sense* yang dimiliki oleh masyarakat yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku. Kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan keterampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya pendukung masyarakat dalam rangka melakukan aktivitas pembangunan.

3. Model-model Pemberdayaan Masyarakat

Paradigma yang digunakan sangat menentukan hasil-hasil pembangunan yang diperoleh. Selama ini paradigma yang digunakan lebih banyak menggunakan dominasi peran dilakukan oleh pemerintah. Peranan negara pada posisi sentral baik dalam merencanakan maupun melaksanakan program. Menurut Korten ada tiga model pembangunan di negara yang sedang berkembang, yaitu *community development*, partisipasi masyarakat dan model desentralisasi.⁷

Ternyata ketiga model pembangunan tersebut pada akhirnya masih diwarnai oleh kelemahan-kelemahan. Model pembangunan masyarakat tak urung

⁶ Ibid., 80.

⁷ Ibid., 35.

mengalami kegagalan untuk mengentaskan kemiskinan karena terbentur pada suatu fenomena dominasi orang kaya. Hal ini disebabkan oleh penguasaan sumber daya, pengaruh politik yang dimiliki orang kaya.

Pendekatan lain adalah model pembangunan desentralisasi. Secara riil pendekatan ini juga tidak mampu mengekspresikan secara penuh dari makna desentralisasi tersebut. Bagian yang disentralisir hanyalah pada fungsi pelaksanaan saja yang diserahkan pada pemerintah daerah, sedangkan pengelolaan keuangan tetap menjadi bagian dari pemerintah pusat.

Adapun tiga model dalam praktek dan pembangunan masyarakat, yaitu *locality development, social planning dan social action*.

a. Model Pembangunan Lokal (*Locality Development*)

Model pembangunan lokal adalah bahwa perubahan dalam masyarakat dapat dilakukan secara optimal bila melibatkan partisipasi aktif yang luas disemua spektrum masyarakat tingkat lokal. Tujuan yang dicapai tidak hanya tujuan akhir, melainkan juga proses untuk mencapai tujuan akhir tersebut sehingga tujuan utamanya yaitu mengembangkan kemampuan masyarakat untuk berfungsi secara integratif.

b. Model Perencanaan Sosial (*Social Planning Model*)

Menekankan pada pemecahan masalah secara teknis terhadap masalah sosial yang substantif, seperti kenakalan remaja, pemukiman, kesehatan mental dan masalah sosial lainnya. Model ini menganggap pentingnya menggunakan cara perencanaan yang matang dan perubahan yang terkendali yakni untuk mencapai tujuan akhir secara rasional. Sasaran yang ingin dicapai dalam model pendekatan ini adalah menciptakan, menyusun dan memberikan bantuanbantuan baik yang bersifat materi maupun pelayananpelayanan yang

berbentuk jasa kepada orang-orang yang membutuhkannya. Dalam model ini yang ingin dikembangkan adalah kemampuan dan kecakapan masyarakat dalam memecahkan permasalahan-permasalahan melalui usaha-usaha terencana, terarah dan terkendali.

c. Model Aksi Sosial (*Sosial Action Model*)

Model ini menekankan betapa pentingnya penanganan kelompok penduduk yang tidak berbentuk secara terorganisir, terarah, sistematis dan meningkatkan kebutuhan yang memadai bagi masyarakat yang lebih luas dalam rangka meningkatkan sumber atau perlakuan yang lebih sesuai dengan keadilan sosial atau demokrasi. Bertujuan mengadakan perubahan yang mendasar di dalam lembaga utama atau kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Model ini juga menekankan pada pemerataan kekuasaan dan sumber-sumbernya, atau dalam hal pembuatan keputusan-keputusan masyarakat dan mengubah dasar kebijakan organisasi-organisasi formal.⁸ Dari beberapa model yang dijelaskan, pada pemberdayaan ekonomi masyarakat lebih menekankan pada model *community development*, yaitu dibentuk oleh sekelompok orang yang hendak memperbaiki kondisi masyarakat di suatu daerah. Dengan misi tertentu, kelompok tersebut mengawalinya dengan menyusun rencana. Konsep *Community Development* diwujudkan ke dalam struktur organisasi yang melibatkan masyarakat sebagai subjek serta objek pemberdayaan. Dalam hal ini yang menyelenggarakan pemberdayaan.

4. Tahap-tahap Pemberdayaan Masyarakat

⁸ Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat* (Bandung : Humaniora Utama, 2013), 67.

Berdasarkan pendapat Sulistiyani bahwa proses belajar dalam pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Tahap-tahap yang harus dilalui yaitu meliputi:

- a. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. Pada tahap ini pihak pemberdaya berusaha menciptakan prakondisi, supaya dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif. Sentuhan penyadaran akan lebih membuka keinginan dan kesadaran masyarakat tentang kondisinya saat itu, dengan demikian akan dapat berlangsung kesadaran mereka tentang perlunya memperbaiki kondisi untuk masa depan yang lebih baik.
- b. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan. Masyarakat akan menjalani proses belajar tentang pengetahuan dan kecakapan keterampilan yang memiliki relevansi dengan apa yang menjadi tuntutan kebutuhan tersebut. Keadaan ini akan menstimulasi terjadinya keterbukaan wawasan dan menguasai kecakapan keterampilan dasar yang mereka butuhkan. Pada tahap ini masyarakat hanya dapat memberikan peran partisipasi pada tingkat yang rendah, yaitu sekedar menjadi pengikut atau objek pembangunan saja, belum mampu menjadi subjek dalam pembangunan.
- c. Tahap pengayaan/peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian. Kemandirian tersebut akan ditandai oleh kemampuan masyarakat di dalam membentuk inisiatif, melahirkan kreasi-kreasi dan melakukan inovasi-inovasi di dalam lingkungannya. Apabila masyarakat

telah mencapai tahap ketiga ini maka masyarakat dapat secara mandiri melakukan pembangunan atau pemeran utama. Pemerintah tinggal menjadi fasilitator saja.⁹

Menurut Hogan menggambarkan proses pemberdayaan yang berkesinambungan terdiri dari lima tahap utama, yaitu menghadirkan kembali pengalaman yang memberdayakan dan tidak memberdayakan, mendiskusikan alasan mengapa terjadi pemberdayaan dan ketidakberdayaan, mengidentifikasi suatu masalah ataupun proyek, mengidentifikasi basis adanya daya yang bermakna dan mengembangkan rencana-rencana aksi dan mengimplementasikannya.¹⁰

Sumodiningrat dalam buku Suryana berpendapat bahwa masyarakat yang sudah mandiri tidak dapat dibiarkan begitu saja. Masyarakat tersebut tetap memerlukan perlindungan supaya dengan kemandirian yang dimiliki dapat melakukan dan mengambil tindakan nyata dalam pembangunan. Di samping itu kemandirian mereka perlu dilindungi supaya dapat terpupuk dan terpelihara dengan baik dan selanjutnya dapat membentuk kedewasaan sikap masyarakat.¹¹

5. Sasaran Pemberdayaan Masyarakat

Perlu dipikirkan siapa yang sesungguhnya menjadi sasaran pemberdayaan. Schumacher dalam Suryana memiliki pandangan pemberdayaan sebagai suatu bagian dari masyarakat miskin yang tidak harus menghilangkan ketimpangan struktural terlebih dahulu. Masyarakat miskin sesungguhnya memiliki daya untuk membangun.¹²

⁹ Ibid., 83.

¹⁰ Adi Subandi, *Pemberdayaan Masyarakat dan Investasi Komunitas* (Jakarta : Lembaga Penerbit FE UI, 2001),173.

¹¹ Suryana, *Pemberdayaan Masyarakat*, 24.

¹² Ibid., 29.

- a. Secara umum masyarakat yang harus diberdayakan yaitu sebagai berikut:
Masyarakat yang belum mandiri.
- b. Masyarakat dengan ekonomi rendah, yaitu mereka yang memang hidup secara nyata berkekurangan, setelah berusaha secara maksimal memperoleh penghasilan, namun penghasilan yang didapatkan masih belum mencukupi kebutuhan hidupnya.
- c. Mereka yang sebenarnya mempunyai kesempatan dalam melakukan upaya untuk memperoleh rezeki namun dalam menjalani pekerjaan atau usahanya, sehingga seringkali banyak mengeluh ketika penghasilan yang diperolehnya tidak mampu mencukupi kebutuhan dasar hidupnya dan keluarganya.

6. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Strategi pemberdayaan adalah suatu cara dalam mengoptimalkan upaya-upaya pemberdayaan yaitu dengan cara mengangkat dan mengembangkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan lebih lanjut dalam rangka memperbaiki taraf kehidupan.

Menurut Suharto pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras, yaitu:¹

- a. Aras Mikro

Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, stress management, crisis intervention. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut pendekatan yang berpusat pada tugas (task centered aproach).

- b. Aras Mezzo

¹ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, 66.

Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.

c. Aras Makro

Pendekatan ini disebut juga sebagai strategi sistem besar (large system strategy), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Strategi sistem besar memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi mereka sendiri untuk memilih dan menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.

7. Proses Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Edi Suharto proses pemberdayaan pada umumnya dilakukan secara kolektif dan tidak ada literatur yang menyatakan bahwa proses pemberdayaan terjadi dalam relasi satu lawan atau satu antara pekerja sosial dan klien dalam setting pertolongan perseorangan. Meskipun pemberdayaan seperti ini dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan diri klien, hal ini bukanlah strategi utama pemberdayaan. Namun tidak semua intervensi pekerjaan sosial dapat dilakukan melalui kolektivitas. Dalam beberapa situasi, strategi pemberdayaan dapat saja dilakukan secara individual, meskipun pada gilirannya strategi ini pun tetap berkaitan dengan kolektivitas, dalam arti mengaitkan klien dengan sumber atau sistem lain di luar dirinya.

Pemberdayaan Masyarakat adalah sebuah konsep yang fokusnya adalah kekuasaan. Pemberdayaan secara substansial merupakan proses memutus (*break down*) dari hubungan antara subjek dan objek. Proses ini mementingkan pengakuan subjek akan kemampuan atau daya yang dimiliki objek. Secara garis besar proses ini melihat pentingnya mengalirkan daya dari subjek ke objek Hasil akhir dari pemberdayaan adalah beralihnya fungsi individu yang semula objek menjadi subjek (yang baru), sehingga relasi sosial yang nantinya hanya akan dicirikan dengan relasi sosial antar subyek dengan subyek lain.² Firman Allah dalam Al-Qur'an :

وَقُلْ أَعْمَلُوا ۖ فَسِيرَی اللّٰهُ عَمَلِكُمْ وَرَسُولُهُ ۚ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسْتُرْدُونَ ۗ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya :

Katakanlah -wahai Rasul- kepada orang-orang yang tidak pergi ke medan jihad dan bertobat dari dosanya, "Tutupilah kerugian yang timbul dari kesalahan kalian di masa lalu, ikhlaskanlah amal kalian kepada Allah, dan lakukanlah hal-hal yang diridai-Nya. Maka Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat amal perbuatan kalian dan kelak di hari Kiamat kalian akan dikembalikan kepada Tuhan kalian yang Maha Mengetahui segala sesuatu. Dia mengetahui apa saja yang kalian sembunyikan dan apa saja yang kalian perlihatkan. Dia akan memberitahukan kepada kalian apa yang telah kalian perbuat di dunia dan Dia akan memberikan balasan sesuai dengan amal perbuatan kalian. (QS. At-Taubah : 105)

Surat At-Taubah ayat 105 tersebut menjelaskan tentang perintah Allah kepada umat-Nya untuk bekerja maka Allah senantiasa akan melihat pekerjaanmu dan memberikan apa yang telah kita kerjakan. Pada pembahasan pemberdayaan ekonomi ini, Allah akan memberikan apa yang telah kita kerjakan yaitu mencukupkan kebutuhan hamba-Nya. Sedangkan pemberdayaan menurut Islam lebih lanjut dikatakan oleh Amrullah Ahmad dalam Pengembangan Masyarakat Islam adalah

² Moh. Ali Aziz, dkk, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat Paradigma Aksi Metodologi* (Yogyakarta : Pustaka Pesantren, 2005), 169.

sebuah sistem tindakan yang nyata yang menawarkan alternatif model pemecahan masalah *ummah* dalam bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam perspektif Islam.³

B. Desa Wisata

1. Pengertian Desa Wisata

Desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.⁴ Desa wisata didefinisikan sebagai sebagian atau keseluruhan wilayah desa yang dimiliki potensi, produk dan aktivitas wisata yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pariwisata dan dikelola oleh kelompok masyarakat desa secara berkelanjutan.⁵

2. Komponen Pembentuk Desa Wisata

Desa wisata dapat terbentuk dengan komponen pembentuknya adalah :

a. Wilayah Desa

Sebuah desa wisata haruslah menjadi bagian dari wilayah satu desa. Bilamana sebuah kegiatan wisata mencakup lebih dari satu wilayah desa, kegiatan wisata tersebut dapat digolongkan kedalam wisata perdesaan dan bukannya desa wisata.

b. Produk Pariwisata

Sebuah desa wisata haruslah memiliki produk wisata sebagai bentuk objek material dari proses perdagangan barang dan jasa yang dilakukan kepada

³ Nanih Machendrawati, dkk, *Pengembangan Masyarakat Islam* (Bandung: Rosdakarya,2001), 29.

⁴ Nuryanti, *Concept, Perspective and Challenges*, Laporan Konferensi Internasional Mengenai Pariwisata Budaya : <http://ejournal.unesa.ac.id/kajian-tentang-kesiapan-desa-margomulyo/2013>. Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada. Diakses tanggal 29 Mei 2020 pukul 11.21 WIB.

⁵ Ida Bagus Suryawan, *Destinasi Pariwisata* (Denpasar : Universitas Udayana, 2015), 9.

wisatawan. Produk pariwisata yang ada dan ditawarkan oleh sebuah desa wisata dapat berupa atraksi wisata, jasa wisata maupun usaha pariwisata yang ada di desa.

c. Organisasi pengelola

Keberadaan organisasi pengelola merupakan hal yang wajib pada sebuah desa wisata. Ketidakterseidannya organisasi pengelola menjadi sebuah jaminan bahwa tidak ada legitimasi dari sebuah pihak yang memanfaatkan dan mengelola sumberdaya pariwisata dengan mengatasnamakan organisasi desa. Organisasi desa wisata yang dibentuk haruslah memiliki kewenangan dan mewakili keberadaan desa, dan diketahui serta disahkan oleh stakeholder di desa baik itu peringkat pemerintahan desa, badan pengawas desa, kelompok organisasi kemasyarakatan di desa maupun perwakilan masyarakat desa.

d. Prasarana dan sarana kewilayahan

Desa Wisata haruslah memiliki prasarana dan sarana kewilayahan sebagai pengejawantahan prasyarat sebuah wilayah.

e. Wisatawan

Sebuah desa bila menetapkan diri sebagai desa wisata haruslah memiliki wisatawan yang berkunjung ke desa. Wisatawan di desa secara umum dapat dikategorikan menjadi sejumlah macam yaitu wisatawan yang datang dan berkunjung ke desa untuk menikmati produk wisata yang ditawarkan dan wisatawan yang datang dan menginap di desa untuk menikmati produk wisata dan keseharian di desa.

f. Jejaring sosial

Sebuah desa wisata haruslah memiliki jejaring dalam upaya proses pendampingan, pengelolaan, dan pengembangan jasa wisata yang dilakukan.

3. Karakteristik Desa Wisata

Setiap desa wisata tentunya memiliki karakteristik tersendiri hal tersebut dilihat dari adanya potensi di desa tersebut sehingga layak untuk dijadikan sebagai desa wisata. Pengelolaan suatu desa wisata sebagai objek wisata tidak hanya terbatas pada penetapannya sebagai desa wisata. Penetapan suatu desa sebagai desa wisata setidaknya didasarkan atas beberapa komponen potensial yang mendukung, yaitu:⁶

- a. Memiliki aksesibilitas yang baik, sehingga mempermudah wisatawan untuk berkunjung dengan menggunakan berbagai jenis alat transportasi.
- b. Harus memiliki obyek-obyek menarik yang dapat berupa alam, seni budaya, legenda, makanan lokal, dan sebagainya untuk dikembangkan sebagai obyek wisata.
- c. Masyarakat serta aparaturnya memberikan dukungan penuh terhadap desa wisata dan wisatawan yang berkunjung kesananya.
- d. Keamanan di desa tersebut terjamin.
- e. Tersedia akomodasi, telekomunikasi, dan tenaga kerja yang cukup memadai.
- f. Memiliki iklim yang sejuk atau dingin.
- g. Memiliki hubungan dengan obyek wisata lainnya yang sudah dikenal oleh masyarakat luas.

Beberapa faktor yang berpengaruh dalam pengembangan desa wisata adalah sebagai berikut :⁷

- a. Pembangunan Sumber daya manusia (SDM)

⁶ Sugiama Gima, *Manajemen Aset Pariwisata* (Bandung: Guardaya Intimarta, 2013), 51.

⁷ *Ibid.*, 53.

Pembangunan sumber daya manusia (SDM), dapat dilakukan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan dan keikutsertaan dalam seminar, diskusi dan lain sebagainya, dan jugadi bidang-bidang kepariwisataan.

b. Kemitraan

Adanya kerjasama yang baik dan saling menguntungkan antara pihak pengelola desa wisata dengan pengusaha pariwisata di kota atau pihak dinas pariwisata daerah terkait dalam beberapa bidang usaha yaitu bidang akomodasi, perjalanan, promosi, pelatihan, dan yang lainnya.

c. Kegiatan pemerintahan di desa

Ada kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa, contohnya adalah seperti rapat dinas, pameran pembangunan, dan upacara adat yang dilaksanakan di desa wisata.

d. Promosi

Desa wisata harus dipromosikan melalui berbagai media, oleh karena itu desa atau kabupaten kawasan sekitar desa wisata harus sering mengundang wartawan dari media cetak maupun elektronik untuk kegiatan promosi yang dilaksanakan.

e. Festival / pertandingan

Secara berkala di desa wisata harus dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang bisa menarik wisatawan untuk berkunjung ke desa wisata tersebut, contohnya mengadakan festival kesenian, pertandingan olahraga, dan lain sebagainya.

f. Melakukan pembinaan terhadap organisasi warga

Penduduk desa biasanya banyak yang merantau ditempat lain. Padahal mereka juga dapat diorganisir dan dibina untuk memajukan desa wisata mereka

melalui organisasi kemasyarakatan dan untuk mengurangi pengangguran didesa.

4. Pengembangan Desa Wisata

Pengembangan Desa Wisata harus memperhatikan kemampuan dan tingkat penerimaan masyarakat setempat yang akan di kembangkan menjadi desa wisata. Hal ini di maksudkan untuk mengetahui karakter dan kemampuan masyarakat yang dapat di manfaatkan dalam pengembangan desa wisata, menentukan jenis dan tingkat pemberdayaan masyarakat secara tepat. Untuk mengetahui penerimaan masyarakat terhadap kegiatan pengembangan desa wisata :

- a. Tidak bertentangan dengan adat istiadat budaya masyarakat setempat
- b. Pengembangan fisik yang di ajukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan desa
- c. memperhatikan unsur kelokalan dan keaslian
- d. Memberdayakan masyarakat desa
- e. Memperhatikan daya dukung dan daya tampung berwawasan lingkungan.⁸

Menurut Gamal Suwanto, unsur pokok yang harus ada untuk menunjang pengembangan desa wisata meliputi lima unsur sebagai berikut :⁹

- a. Obyek dan daya tarik wisata

Umumnya daya tarik suatu obyek wisata didasarkan pada beberapa hal sebagai berikut: Adanya sumber daya yang dapat menimbulkan rasa senang, indah, nyaman dan bersih, Adanya aksesibilitas yang tinggi untuk dapat

⁸ Antara Made, *Pengelolaan Pariwisata Berbasis Potensi Lokal* (Denpasar : Pustaka Larasan, 2015), 27.

⁹ Ibid., 28

mengunjunginya., Adanya ciri khusus/spesifikasi yang bersifat langka, Adanya sarana/prasarana penunjang untuk melayani para wisatawan yang hadir, Obyek wisata alam mempunyai daya tarik tinggi karena keindahan alam pegunungan, sungai, pantai, pasir, hutan, dan sebagainya, Obyek wisata budaya mempunyai daya tarik tinggi karena memiliki nilai khusus dalam bentuk atraksi kesenian, upacara-upacara adat, nilai luhur yang terkandung dalam suatu obyek buah karya manusia pada masa lampau.

b. Prasarana wisata

Prasarana wisata merupakan sumber daya alam dan sumber daya buatan manusia yang pasti dibutuhkan oleh wisatawan dalam kunjungannya di daerah tujuan wisata, seperti contohnya jalan, listrik, air, telekomunikasi, terminal, jembatan, dan lain sebagainya.

c. Sarana wisata

Sarana wisata adalah kelengkapan di daerah tujuan wisata yang disiapkan untuk melengkapi kebutuhan wisatawan dalam melakukan kunjungan wisatanya. Contohnya dapat berupa hotel atau penginapan, biro perjalanan, alat transportasi, pusat pernak-pernik atau cindramata, rumah makan dan restoran serta sarana pendukung lainnya.

d. Infrastruktur

Infrastruktur merupakan suatu keadaan yang mendukung fungsi sarana dan prasarana wisata baik itu yang berupa suatu pengaturan maupun bangunan fisik di atas permukaan tanah dan di bawah tanah contohnya seperti sistem pengairan, distribusi air bersih, sistem pembuangan air limbah, sumber listrik dan energi, sistem jalur angkutan dan terminal, sistem komunikasi dan sistem keamanan atau pengawasan.

e. Masyarakat

Ada tiga faktor yang terdapat di dalam masyarakat yaitu dari masyarakat sekitar obyek pariwisata, lingkungan yang merupakan lingkungan alam di sekitar obyek pariwisata, dan budaya yang ada pada masyarakat di dalam lingkungan pariwisata.

Masyarakat lokal berperan penting dalam pengembangan desa wisata karena sumber daya dan keunikan tradisi dan budaya yang melekat pada komunitas tersebut merupakan unsur penggerak utama kegiatan desa wisata. Dilain pihak, komunitas lokal yang tumbuh dan hidup berdampingan dengan suatu objek wisata menjadi bagian dari sistem ekologi yang saling kait mengait, karena keberhasilan pengembangan desa wisata tergantung pada tingkat penerimaan dan dukungan masyarakat lokal. Masyarakat lokal berperan sebagai tuan rumah dan menjadi pelaku penting dalam pengembangan desa wisata secara keseluruhan tahapan mulai dari tahap perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan evaluasi karena masyarakat lokal berkedudukan sama penting dengan pemerintah dan swasta sebagai salah satu pemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata.